

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Harahap (2003) yang menemukan bahwa pengaruh jumlah jam melaut, jumlah tanggungan keluarga dan jumlah modal masing-masing nyata dan signifikan dengan tingkat pendapatan nelayan di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Sedangkan pendidikan terakhir nelayan tidak memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan.

Sasmita (2006) melalui penelitiannya menunjukkan bahwa modal kerja, tenaga kerja, dan waktu melaut (jam kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nelayan di Kabupaten Asahan sebesar 60,73 persen. Variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen tersebut masing-masing nyata pada taraf signifikansi 99 persen, 90 persen, dan 95 persen. Sedangkan pengalaman sebagai nelayan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nelayan. Namun demikian modal kerja sangat dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sujarno (2008) menunjukkan bahwa modal kerja, tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan nelayan. Dengan kata lain, apabila modal kerja, tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut meningkat maka pendapatan nelayan juga akan meningkat.

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu dari jurnal dan skripsi yang merujuk pada tema yang sama dengan penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti Tahun	Metode	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini	Hasil
Daniel Halim (2012)	Metode Penelitian Kualitatif	“Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat nelayan pantai di Kabupaten Bantul 2012”Jurnal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan, sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat nelayan pantai Kabupaten Bantul. Ketika modal yang digunakan cukup besar maka pendapatan yang diperoleh oleh nelayan juga besar	Perbedaan tersebut terletak pada lokasi di kabupaten bantul, menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian Modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat nelayan pantai di Kabupaten Bantul.	Hasil penelitian saya bahwa pengaruh peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 ini pro kontra dengan masyarakat khususnya nelayan Mayangan dengan diberlakukan kebijakan ini sangat tidak kondusif terhadap pendapatan
Lovelly Dwinda Dahen (2016)	Metode Penelitian Kualitatif	“Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dikatakan bahwa	Perbedaan tersebut terletak pada lokasi	Hasil penelitian saya bahwa pengaruh

		Kecamatan Koto Tangah Kota Padang” Jurnal	modal, jam kerja, dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan pemilik payang di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.	Padang, Jenis penelitian ini deskriptif asosiatif, menggunakan teori pendapatan, hasil penelitiannya modal, jam kerja, dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan	peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 ini pro kontra dengan masyarakat khususnya nelayan Mayangan dengan diberlakukan kebijakan ini sangat tidak kondusif terhadap pendapatan
Abdul Manap (2018)	Metode Penelitian Kualitatif	“Pengaruh Pendapatan Nelayan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara” Skripsi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penapatan nelayan terhadap gaya hidup masyarakat Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pendapatan nelayan termasuk tinggi yang ditunjukkan dari minat, sikap positif yang tinggi.	Perbedaan tersebut terletak pada lokasi Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu: kuesioner, hasil penelitian untuk mengetahui pengaruh pendapatan nelayan terhadap	Hasil penelitian saya bahwa pengaruh peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 ini pro kontra dengan masyarakat khususnya nelayan Mayangan dengan diberlakukan kebijakan ini sangat tidak kondusif terhadap pendapatan

				peningkatan ekonomi	
Nurbaya (2019)	Metode penelitian kualitatif	“Pengaruh pendapatan nelayan terhadap peningkatan ekonomi di Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan” Skripsi.	Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan nelayan baik yang bersumber dari usaha penangkapan ikan maupun usaha sampingan nelayan akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan, begitupun sebaliknya penurunan pendapatan nelayan akan berdampak terhadap penurunan kegiatan ekonomi masyarakat nelayan di desa wewangriu Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur	Perbedaan tersebut terletak pada lokasi di Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan spenelitian, metode penelitian kualitatif, hasil penelitian Pendapatan nelayan baik yang bersumber dari usaha penangkapan ikan	Hasil penelitian saya bahwa pengaruh peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 ini pro kontra dengan masyarakat khususnya nelayan Mayangan dengan diberlakukan kebijakan ini sangat tidak kondusif terhadap pendapatan

Nabila Nur Fitriani (2021)	Metode Penelitian Kualitatif	“Pengaruh Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 terhadap pendapatan para nelayan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo” Skripsi.	Sedang dalam proses penelitian	Perbedaan tersebut terletak pada Rumusan penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, metode kualitatif, hasil penelitian, dan program studi.	Hasil penelitian saya bahwa pengaruh peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 ini pro kontra dengan masyarakat khususnya nelayan Mayangan dengan diberlakukan kebijakan ini sangat tidak kondusif terhadap pendapatan
----------------------------	------------------------------	--	--------------------------------	--	--

Sumber : Nabila, 2021

Pada tabel diatas, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dengan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah kesamaan pada topik yang sedang dibahas yaitu mengenai pendapatan nelayan.

Sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu meneliti di lingkup Kota, ada yang meneliti di lingkup Provinsi, dan ada yang meneliti pada lingkup nasional. Selain itu perbedaan dengan penelitian tersebut ada yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan ada juga yang menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Kerangka Dasar Teoritik

1. Administrasi

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Soewarno dalam Wijaya & Irawan (2018), Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk tujuan.

Dari beberapa pengertian administrasi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggara kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.

a. Tujuan Administrasi

Tujuan administrasi terbagi menjadi dua yaitu :

1. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang lebih kepada organisasi itu sendiri, artinya dengan adanya pola administrasi, ditujukan untuk mencapai target sebuah organisasi pada dasarnya tujuan jangka panjang tidak dibuat oleh sembarang orang dalam organisasi melainkan oleh para pemilik organisasi tersebut, yang bersifat :

- Ideal
- Administrasi bersifat general
- Kualifikasi tidak terbatas

2. Tujuan jangka pendek

Tujuan administrasi jangka pendek organisasi bersifat lebih kecil, biasanya dibuat oleh sub-sub divisi dari organisasi untuk kebijakan divisinya. Tujuan jangka pendek bersifat spesifik, ruang lingkup kecil dan kualifikasinya terbatas. (Irra Chisyanti Dewi (2011: 3)

b. Ciri Ciri Administrasi

1. Adanya suatu kelompok atau organisasi yang terdiri dari dua atau lebih
2. Terdapat kerja sama antar antar pegawai dan atasan.
3. Terdapat suatu proses atau usaha.
4. Adanya sebuah bimbingan, dalam kepemimpinan dan dalam pengawasan.
5. Dalam sebuah perusahaan, organisasi, atau instansi harus memiliki satu tujuan (Irra Chisyanti Dewi (2011: 3)

c. Fungsi dan jenis Administrasi

1. Perencanaan(planning)

Perencanaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data awal, pengolahan data, hingga menyusun rencana, untuk membuat sebuah pekerjaan, atau proyek tertentu.

2. Penyusunan (organizing)

Fungsi administrasi berikutnya adalah menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan suatu organisasi

3. Pengadaan tenaga kerja (staffing)

Staffing merupakan fungsi administrasi untuk menemukan, menilai, mengevaluasi dan menetapkan hubungan kerja dengan karyawan atau tenaga kerja dan memberhentikannya jika tidak lagi dibutuhkan.

4. Pemberian bimbingan (directing)

Fungsi administrasi berikutnya adalah pemberian bimbingan, memberikan saran-saran, masukan untuk perbaikan suatu kegiatan yang sedang dilakukan agar tugas dapat dilaksanakan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

5. Pengkoordinasian (coordinating)

Fungsi administrasi adalah untuk mengkoordinasi seluruh kepentingan dan tujuan dari organisasi atau perusahaan yang dilaksanakan agar bisa bersatu dan dapat sejalan dengan tempat dan waktu yang sama.

6. Pelaporan (reporting)

Fungsi administrasi sebagai pelaporan adalah memberikan informasi mengenai apa yang telah dilakukan dalam sebuah kegiatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

7. Penganggaran (budgeting)

Budgeting adalah suatu kegiatan yang mengelola dan perencanaan yang berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran. (Budi, 2017)

d. Unsur Administrasi

Ada beberapa unsur penting yang wajib ada di sebuah bidang bisnis. Menurut The Liang Gie 1993 hal 1 - 20 of 27 , ada delapan unsur yang harus ada, yakni:

1. Organisasi

Organisasi dalam unsur administrasi publik dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang menjadi kerangka bagi segenap masyarakat atau pemerintah untuk melakukan kegiatan dengan cara mengelompokkan pekerjaan. Sehingga dapat diartikan bahwasanya organisasi ini menjadi sistem kerjasama sekelompok secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya.

2. Manajemen

Manajemen dalam unsur administrasi publik dapat diartikan sebagai upaya penataan dengan menggerakkan orang atas dasar organisasi, sehingga dengan begitu seseorang akan tergerak dan dapat membagi tugasnya antara satu dengan yang lainnya.

3. Komunikasi

Komunikasi dalam unsur administrasi publik dapat diartikan sebagai kegiatan penataan yang berupa penyampaian warta dari komunikator ke

komunikasikan dalam kerjasama sehingga mencapai tujuan tertentu yang dihasilkan dalam bentuk kerjasamanya tersebut.

4. Kepegawaian

Kepegawaian dalam unsur administrasi publik dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan penataan berupa penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan informasi antara satu.

5. Perbekalan

Perbekalan dalam unsur administrasi publik dapat diartikan sebagai aktifitas untuk menyangkut pautkan terhadap peralatan, sehingga pembekalan akan menjadi suatu usaha kerja sama antara organisasi yang berupa proses pengadaan, penyimpanan, sampai kepada penyingkiran barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi

6. Keuangan

Keuangan Sering disebut administrasi keuangan. Bidang ini berfokus pada tugas penganggaran belanja, pembukuan, pemeriksaan atau auditing serta pekerjaan di ranah keuangan lainnya

7. .Ketatausahaan

Merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengiriman serta penyimpanan berbagai informasi yang diperlukan dalam kerja sama. Ketatausahaan bisa menyangkut administrasi perkantoran, manajemen perkantoran, tata persuratan, arsip, sekretaris, dan lainnya

8. Hubungan masyarakat

Hubungan masyarakat atau sering disingkat dengan humas adalah sebuah kegiatan yang bertujuan menciptakan hubungan baik dengan masyarakat dalam kaitannya dengan usaha yang sedang dijalani

e. Hubungan administrasi dengan pembangunan

Administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma administrasi negara yakni paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara pada sekitar tahun 1970. Hal ini seperti diketahui bersama bahwa dalam perjalanannya menemukan jati diri, Administrasi negara melalui lima paradigam hingga akhirnya diakui sebagai ilmu administrasi negara yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dengan ilmu politik sekalipun bersifat indiscipliner. Administrasi Pembangunan sendiri mulai dikembangkan dalam administrasi negara yang biasanya lebih difokuskan kepada negara-negara berkembang. Administrasi pembangunan hadir sebagai bidang ilmu dalam menjalankan bagaimana proses pembangunan di negara-negara berkembang agar semakin baik dan dapat mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju. Kondisi di negara-negara berkembang yang dianggap cukup terpuruk dan jauh dari cara-cara atau metode-metode untuk mengembangkan diri memaksa agar administrasi pembangunan mengambil tempat dan posisi strategis. keberadaan administrasi negara dan administrasi pembangunan ini sendiri tidaklah tepat untuk dibedakan secara sengaja dengan maksud untuk memperjelas posisi kedua bidang ilmu ini karena administrasi pembangunan

sendiri hadir atau muncul dari perkembangan administrasi negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi pembangunan adalah bagian dari administrasi negara yang konteks dan kontennya berupa penjabaran lebih lanjut akan penyelenggaraan negara lewat administrasi negara. Administrasi negara kerap dipahami sebagai kegiatan kerjasama dalam proses penyelenggaraan negara dengan memanfaatkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan bernegara, sementara administrasi pembangunan juga berupa kegiatan kerjasama yang lebih difokuskan dalam pembangunan. Dengan kata lain, administrasi negara hadir secara menyeluruh akan segala aspek yang menyangkut negara/publik dan ada dalam jangka waktu yang cukup lama, sementara itu administrasi pembangunan lebih memprioritaskan daerah sasaran yang lebih bermasalah/ tertinggal (negara berkembang) dan biasanya program-programnya lebih singkat daripada administrasi negara. namun dengan catatan bahwa administrasi pembangunan hadir juga untuk menyokong berjalannya administrasi negara sehingga diharapkan akan timbul sinergi positif yang diperlihatkan dengan terjadinya pembangunan di segala aspek kehidupan bernegara. (Tjokroamidjojo, 1990).

f. Paradigma Administrasi Negara

Perkembangan peradaban, pemikiran dan dinamika masyarakat berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu administrasi publik. Denhardt dan Denhardt 2003 dalam Sabaruddin 2015

membagi perkembangan ilmu administrasi publik pada tiga paradigma besar, yaitu:

a. Paradigma Administrasi Publik Klasik (*Old public Administration*) 1887-1987

Konsep *Old Public Administration* dalam perkembangannya menurut Denhardt dan Denhardt dalam Sabaruddin 2015: 16 memunculkan konsep-konsep baru yaitu:

Pertama, model rasional pandangan Herbert A Simon yang mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan standar lainnya, konsep utama yang ditampilkan Simon adalah Rasionalitas.

Kedua, *public choice* (pilihan public), pandangan ini didasarkan pada tiga asumsi kunci yaitu,:

- Teori ini memusatkan perhatian pada individu dengan asumsi bahwa pengambil keputusan perorangan adalah rasional, mementingkan diri sendiri dan berusaha memanfaatkan orang lain.
- Teori ini memusatkan perhatian pada barang publik sebagai output dari badan-badan publik.

- Teori ini berdasarkan asumsi bahwa situasi keputusan berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan pilhan.

Denhardt dan Denhardt 2003 dalam Sabaruddin 2015: 17 menjelaskan pandangan *old public administration* yaitu:

- a. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh instansi yang berwenang.
- b. *Public policy* dan administasi berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan politik.
- c. Administrasi publik mempunyai peranan terbatas dalam pembuatan kebijakan dan lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik.
- d. Pemberian pelayanan public harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat atau birokrat politik.
- e. Administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik.
- f. Program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis, dengan manajer menjalankan puncak organisasi.

g. Peranan administrator publi dirumuskan sebagai fungsi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting.

Berdasarkan pandangan tersebut maka perspektif Administrasi publik klasik menempatkan organisasi tertutup sehingga keterlibatan masyarakat dan pemerintahan dinilai tidak penting.

b. Paradigma *New Public Management* (Manajemen Publik Baru) 1990-2000

Lahirnya konsep *new public management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi terhadap lemahnya birokrasi tradisional dalam paradigma administrasi publik klasik. Dernhardt dan Dernhardt 2013:13 dalam Sabaruddin 2015 menjelaskan perspektif new public management semua pimpinan/manajer didorong untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk mencapai hasil maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan.

NPM berkehendak meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan social. Nilai-nilai ekonomis (bisnis) yang dianut NPM seringkali bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan publik. Pengelolaan pelayanan

publik yang diserahkan kepada sector swasta pada satu sisi meningkatkan kinerja pelayanan public, namun cenderung dinikmati orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.

c. Paradigma *New Public Service* (Pelayanan Publik baru)

Menurut Dernhardt dan Dernhardt 2003:170 (dalam Sabaruddin 2015:21) perspektif NPS mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang semata sebagai kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain.

Dalam pendekatan NPS, administrasi public tidak bisa dijalankan seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki NPM karena administrasi Negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan publik, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan tetapi memberikan pelayanan untuk kepentingan demokrasi (Dernhardt dan dernhardt dalam Syafri 2012:196).

Sementara itu istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan

secara langsung *stakeholder* diluar negara, berorientasi consensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Hash 2007 dalam Syafri 2012:198).

g. Pergeseran Administrasi Negara

Perkembangan ilmu administrasi negara akhir ini telah mengalami pergeseran di titik tekan dari *Administration of Public* ke *Administration by Public* dimana dalam *Administration of Public* negara sebagai agen pertama implementasi fungsi Negara atau pemerintahan. Konsep ini menekankan fungsi pemerintahan bertugas sebagai *public service (administration of public)*. Sementara *Administration by Public* berorientasi bahwa publik *deman are differetianted*, dalam arti fungsi pemerintah hanyalah sebagai pelatihan, perubahan yang bertitik tekan pada *putting the customers in the driver set*. Dimana determinasi pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama sebagai *driving forces*. Dikalangan masyarakat istilah *Public Administration* yang selalu menimbulkan pertanyaan di kalangan akademisi seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin dinamis. dengan kondisi faktual yang dilihat dari pengelolaan pemerintah dalam berorientasi pada kekuasaan yang ada. Orientasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintahan inilah yang telah menimbulkan persepsi tentang pengertian *Public Administration* dengan Administrasi Negara. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, Istilah ini telah bergeser sesuai dengan

pergeseran cara berpikir serta realita perubahan pengelolaan pemerintah itu sendiri. perubahan makna publik sebagai negara, menjadi publik sebagai masyarakat. Dalam arti bahwa administrasi negara bukan lagi terlalu berorientasi kepada aktivitas oleh Negara atau pemerintahan, tetapi juga menjadi perubahan dan pelatihan kepada masyarakat. Pendekatan administrasi negara tidak lagi kepada negara tetapi titik tekannya kepada masyarakat.

Utomo, (2008:8) mengatakan bahwa proses, sistem, prosedur, hierarchi atau lawfull state tidak lagi merupakan acuan yang utama meskipun tetap perlu diketahui dan merupakan skill. Tetapi results, teamwork fleksibilitas harulah lebih dikedepankan disebabkan oleh tekanan, pengaruh, adanya *differetianted public demand*. Sedangkan sebagai seorang administrator atau mereka yang mendalami administrasi publik dituntut untuk memiliki pengetahuan, skill, kemampuan, profesionalisme, kapabilitas untuk mengembangkan konsep organisasi serta mengorganisir dan aktivitas dalam melakukan perubahan dan pelatihan administrasi dengan infrastruktur dalam memahami tuntutan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari penjelasan diatas tidak berarti bahwa administrasi publik (negara) melepaskan atau terlepas sama sekali dari kehidupan atau permasalahan dalam pemerintahan yang telah melepaskannya. (Ida Ayu Putu Sri Widnyani 2017: 93–102)

h. Hubungan Administrasi Negara dengan Kebijakan Publik

Administrasi adalah jenis pekerjaan yang memanfaatkan aktivitas manusia dalam pola kerjasama sebagai upaya mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien, menurut Rahmat dalam (Siswandi, 2017). Sedangkan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (Anderson dalam Agustino, 2017: 17). Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Yang menyeimbangkan peran pemerintah mempunyai kewajiban dan menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik segala kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan publik yang ada. Jadi, ada hubungannya kebijakan publik dengan administrasi karena segala aktivitas pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam keseharian, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Berbicara tentang administrasi pasti berkenaan dengan tindakan pemerintah dalam mengelola kegiatan yang ada atau implementasi kebijakan publik. Berbicara tentang hubungan antara administrasi dengan organisasi, Administrasi yang selalu meninjau kegiatan atau aktivitas organisasi. Jadi kegiatan administrasi harus berlangsung

secara efektif dan efisien dalam melakukan segala hal yang dibutuhkan oleh organisasi atau lembaga pemerintahan agar bisa tercapai secara maksimal. Organisasi atau lembaga pemerintah juga melibatkan seseorang untuk bekerjasama antara pihak administrasi dengan organisasi agar bisa mencapai keinginan kedua belah pihak. Sedangkan hubungan administrasi dengan pelayanan, Administrasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan proses Pelayanan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang p.Siagian, 2001:4). Jadi pada dasarnya hubungan antara administrasi dengan pelayanan merupakan segala bentuk proses kerja sama dengan dua orang atau lebih agar mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila dikaitkan dengan Administrasi, pelayanan yang akan berperan aktif dalam melakukan segala kebutuhan masyarakat. Sebagai masyarakat juga penting untuk dilayani agar berjalan dengan optimal dan terciptanya kerja sama yang baik. Di katakan pelayanan yang setelah memenuhi kebutuhan masyarakat secara administrasi atau lainnya.(Nigro 1980).

2. Kebijakan Publik

a). Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan dapat diatasi dengan baik. Banyak konsep kebijakan publik yang dibahas para ahli.

Menurut Chief J.O Udoji (dalam Wahab, 2004:15), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Menurut Nugroho (2008:11-15), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat

Kebijakan publik memang sudah sepatutnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat, sehingga segala kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bukan hanya atas nama kepentingan publik saja, tetapi juga benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik juga menjadi sarana yang mendukung aspirasi masyarakat dan mampu mengakomodir semuanya menjadi suatu cita-cita bersama.

b). Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas. Hal itu karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan. Contohnya seperti kebijakan publik dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang pertanian, bidang pertahanan dan bidang

lain. Adapun ruang lingkup dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Studi mengenai perilaku birokrasi dan elite politik.
2. Peran kelompok kepentingan di dalam proses kebijakan.
3. *Shared Concern* dan *shared problems* antara para aktor politik yang terlibat di dalam proses pembuatan, implementasi dan sebuah evaluasi kebijakan. (Awan Y dan Yudi R 2016:31).

c). Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan

(repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

d). Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan atau formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pandangan Dunn (2004 : 132) mengatakan perumusan kebijakan (policy formulation) yakni pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa, keadaan dan situasi tertentu dapat menimbulkan satu atau beberapa problem, tetapi agar hal itu menjadi masalah publik tidak hanya tergantung dari dimensi obyektifnya saja, tetapi juga secara subyektif, baik oleh masyarakat maupun para pembuat keputusan, dipandang sebagai suatu masalah yang patut dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, suatu problem, untuk bisa berubah menjadi problem umum tidak hanya cukup dihayati oleh banyak orang sebagai sesuatu masalah yang perlu segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki political

will untuk memperjuangkannya dan yang lebih penting lagi, kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problem umum itu menjadi problem kebijakan, memasukkannya kedalam agenda pemerintah dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi problem yang akan dipecahkan kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problem tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan (Abdul Wahab 1997).

3. Organisasi

Pengertian organisasi menurut Hasibuan (2013:24) adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Waldo dalam bukunya Silalahi (2011:124), menyebutkan bahwa Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.

Menurut Robbins dalam Sembiring (2012:38) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

4. Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan

5. Nelayan

Nelayan adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam laut baik itu berupa ikan, udang, rumput laut, kerang, terumbu karang dan hasil kekayaan laut lainnya (Rosni, 2017). Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lain dan nelayan identik dengan kemiskinan, banyaknya jumlah anak dalam keluarga dan pendidikan yang rendah (Kusnadi, 2009).

- a. Klasifikasi kelompok nelayan berdasar kepeilikan sarana penangkapan ikan (UU bagi hasil perikanan) :

1. Nelayan Penggarap

Nelayan penggarap adalah orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut, bekerja dengan sarana penangkapan ikan milik orang lain.

2. Juragan/Pemilik

orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa/memiliki atas sesuatu kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan, yang dioperasikan oleh orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka disebut juragan/pengusaha. Jika pemilik sekaligus bekerja melaut menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal.

- b. Klasifikasi nelayan berdasar kelompok kerja

1. Nelayan/Perorangan

Nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

2. Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Adalah gabungan dari minimal 10 (sepuluh) orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama non-badan hukum.

3. Nelayan/perusahaan

nelayan pekerja atau Pelaut Perikanan yang terikat dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan badan usaha perikanan.(Charles 2001 dalam Widodo 2006))

c. Klasifikasi nelayan berdasar jenis perairan

1. Nelayan Laut

nelayan yang menangkap ikan pada perairan laut.

2. Nelayan Pantai (Territory Fishers)

Adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan laut teritorial.

3. Nelayan Lepas Pantai (ZEE Fishers)

Adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan laut Lepas Pantai (ZEE).

4. Nelayan Laut Lepas (High Seas Fishers)

Adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan laut.

5. Lepas (High Seas)

Nelayan Perairan umum pedalaman (PUD)

Adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan umum pedalaman (PUD)

d. Klasifikasi nelayan berdasar uu perikanan

1) Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. (Sumber: Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 45

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

2) Nelayan kecil

Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). (Sumber: Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

e. Klasifikasi nelayan berdasar mata pencaharian

1) Nelayan subsisten (subsistence fishers)

Adalah nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

2) Nelayan asli (native/indigenous/aboriginal fishers)

Adalah nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.

3) Nelayan komersial (commercial fishers)

Adalah nelayan yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

4) Nelayan rekreasi (recreational/sport fishers)

adalah orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga. (Sumber: Charles 2001 dalam Widodo 2006)

f. Klasifikasi nelayan berdasar aspek keterampilan profesi

1) Nelayan-nonformal

Keterampilan profesi menangkap ikan yang diturunkan/dilatih dari orang tua atau generasi pendahulu secara non-formal.

2) Nelayan formal akademis

Keterampilan profesi menangkap ikan yang didapat dari belajar dan berlatih secara sistematis akademis dan bersertifikasi/berijazah.

g. Klasifikasi nelayan berdasar teknologi

1. Nelayan Tradisional

menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.

2. Nelayan Modern

menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor

yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka (Imron, 2003:68).

h. Klasifikasi nelayan berdasar mobilitas

1) Nelayan Lokal

Nelayan yang beroperasi menangkap ikan sesuai perairan WPP dalam ijin yang dikeluarkan oleh otoritas Pemerintah Daerah setempat.

2) Nelayan Andon

Nelayan dengan kapal berukuran maksimal 30 (tiga puluh) Gross Tonage yang beroperasi menangkap ikan mengikuti ruaya kembara ikan di perairan otoritas teritorial dengan legalitas ijin antar Pemerintah Daerah.

i. Klasifikasi nelayan berdasar status kewarganegaraan

1. Nelayan Indonesia

Nelayan yang berasal dari kewarganegaraan Indonesia yang terdaftar dalam database nasional dan memiliki identitas Kartu Nelayan Indonesia (KNI).

2. Nelayan Asing

Nelayan yang berasal dari kewarganegaraan Negara lain yang terdaftar dalam database nasional Indonesia dan memiliki identitas Kartu Nelayan Asing (KNA) di Indonesia.

j. klasifikasi nelayan berdasar daftar identitas

1. Nelayan Beridentitas

Nelayan yang terdaftar dalam database nasional Indonesia dan memiliki identitas Kartu Nelayan Indonesia.

2. Nelayan Tanpa Identitas

Nelayan yang tidak terdaftar dalam database nasional Indonesia dan tidak memiliki identitas Kartu Nelayan Indonesia.

k. Klasifikasi nelayan berdasar gender

1. Wanita Nelayan

adalah istri dari nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), pihak yang secara langsung terlibat dalam kondisi dari aktivitas penunjang kegiatan produksi ikan nelayan. Wanita nelayan umumnya berperan membantu mendistribusikan hasil laut dari suami atau keluarganya dengan cara mengolah ikan atau menjualnya kepasar.

a. Taruna (Putra-Putri) Nelayan

Adalah Putra-Putri dari nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), pihak yang secara tidak langsung menunjang kegiatan produksi penangkapan nelayan. Kegiatan berupa pelestarian lingkungan sumberdaya ikan berupa

mangrove, padang lamun, terumbu karang, bersih pantai dan sungai.

6. Teori Pengaruh Sosial

a. Pengaruh sosial

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Influence atau pengaruh yaitu daya yang timbul pada khalayak sebagai akibat dari pesan komunikasi, yang mampu membuat mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang untuk menuju arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh yang positif maka, seseorang akan berubah menjadi lebih baik, yang memiliki visi misi jauh kedepan.

Menurut Wang dan Chou dalam Haryono & Brahmana (2015), pengaruh sosial atau social influence adalah tentang strategi seseorang membujuk orang lain dalam mempengaruhi keputusan untuk berperilaku. Hal ini didukung oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, dan lingkungan pekerjaan

b. Tingkatan Pengaruh Sosial

Menurut Raditya (2013) social influence memiliki 2 tingkatan penerimaan pengaruh, yaitu:

- 1) Acceptance (Penerimaan), kondisi dimana terjadinya perubahan dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain.
- 2) Compliance, kondisi di mana tidak terjadinya perubahan secara utuh dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain.

c. Bentuk-Bentuk Pengaruh Sosial

Menurut Hidayat & Bashori (2016) Pengaruh Sosial memiliki 3 bentuk, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Konformitas (Conformity) Konformitas adalah salah satu bentuk pengaruh sosial atau social influence dimana terdapat perubahan perilaku yang disebabkan oleh keinginan untuk mengikuti tolak ukur orang lain atau norma sosial yang ada.
- 2) Kesepakatan (Compliance) Kesepakatan adalah suatu bentuk pengaruh sosial atau social influence yang mencakup permintaan langsung seseorang kepada orang lain.
- 3) Kepatuhan (Obdience) Kepatuhan adalah bentuk pengaruh sosial atau social influence dimana terdapat perubahan perilaku karena adanya perintah orang lain yang memiliki otoritas.

d. Dimensi dan indikator Pengaruh Sosial

Menurut Engel, Blackwell & Miniard, dan Morrison dalam Putri (2011), social influence memiliki 3 dimensi sebagai berikut:

1) Kelompok Referensi Menurut Wibowo & Riyadi (2017) kelompok referensi adalah dampak yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya, baik memberikan dampak secara spontan mau pun tidak spontan yang memberikan suatu kriteria khusus. Kelompok referensi memiliki 3 indikator, yaitu sebagai berikut:

- a) Information
- b) Utility
- c) Value Expressive

2) Keluarga Menurut Morrison dalam Ramadhani (2017) keluarga adalah lembaga pembelanjaan terpenting dalam masyarakat yang menjadi bahan observasi. Keluarga memiliki 6 indikator, diantaranya sebagai berikut:

- a) Influencer adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain. Di mana dalam hal ini, para anggota keluarga memberikan informasi kepada anggota keluarga yang lain mengenai suatu produk atau jasa.
- b) Gate keeper Gate keeper adalah penjaga pintu. Yang berarti, anggota keluarga mengawasi perkembangan informasi tentang produk atau jasa kepada keluarga.
- c) Decider Decider merupakan pengambil keputusan. Artinya, para anggota keluarga memiliki wewenang baik secara sepihak atau

bersama-sama dalam menentukan sebuah ketetapan untuk berbelanja, membeli, menggunakan, atau tidak menggunakan lagi suatu barang atau jasa.

d) Buyer Buyer merupakan pembeli. Artinya, para anggota keluarga melakukan sebuah transaksi pembelian produk atau jasa.

e) User User merupakan pemakai. Yang berarti, para anggota keluarga menggunakan atau mengkonsumsi sebuah produk atau jasa.

f) Disposer Disposer merupakan pemelihara. Yang berarti, para anggota keluarga memelihara atau membenahi produk sehingga mendapatkan kepuasan secara berkelanjutan.

3) Peran dan Status

a) Peran, konsumen memilih produk berdasarkan tugas pada suatu posisi yang mereka jalankan.

b) Status, konsumen memilih produk berdasarkan posisi atau kedudukan dalam suatu kelompok.

7. Teori Pendapatan

Menurut Hadi dan Hastuti (2015) menyatakan bahwa: Pendapatan adalah peningkatan aktiva suatu organisasi atau penurunan kewajiban-kewajiban selama suatu periode akuntansi, terutama berasal dari aktiva operasi. Pendapatan juga dikatakan sebagai penghasilan yang timbul dari perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalti dan sewa.

Pendapatan menurut (Baroroh 2019) merupakan seluruh hasil yang di terima seseorang atau individu baik berupa uang maupun barang dari hasil pekerjaan dalam bidang jasa atau produksi, yang di peroleh setiap harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kontrak kerja awal.

Pada dasarnya pendapatan/ penghasilan masyarakat yang berbeda itulah yang menyebabkan taraf kesejahteraan masyarakat juga berbeda, maka akan timbul dalam masyarakat ada golongan kaya dan golongan miskin. Perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu adalah wajar, karena beberapa faktor yang terdapat pada diri manusia masing-masing. Menurut ahli ekonomi klasik, pendapatan ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Semakin besar kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa, semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan. Mayers memandang pendapatan dari sisi efektifitas penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan adalah pendapatan adalah nilai barang dan jasa tertentu pada akhir jangka tertentu yang mempunyai indikasi bahwa makna pendapatan bisa jadi bergeser seiring dengan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Menurut Sukirno, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu priode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Dalam bentuk yang lebih spesifik, nilai pendapatan sebagai indeks untuk menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan dan jurang tingkat kesejahteraan dikritik karena perbandingan secara demikian mengabaikan

adanya perbedaan dalam hal-hal komposisi semua penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, dan pola pengeluaran masyarakat. Berikut ada beberapa klasifikasi pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan Pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
- b. Pendapatan Disposibel yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibenclanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
- c. Pendapatan Nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun

8. Indikator Pendapatan

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2011:35) dalam buku "Teori Akuntansi": "Pendapatan merupakan jumlah uang yang diperoleh suatu perusahaan atas penciptaan barang atau jasa selama suatu kurun waktu tertentu.

Menurut Bramastuti, indikator pendapatan antara lain:

- 1) Pendapatan yang diterima perbulan
- 2) Pekerjaan
- 3) Anggaran biaya sekolah
- 4) Beban keluarga yang ditanggung

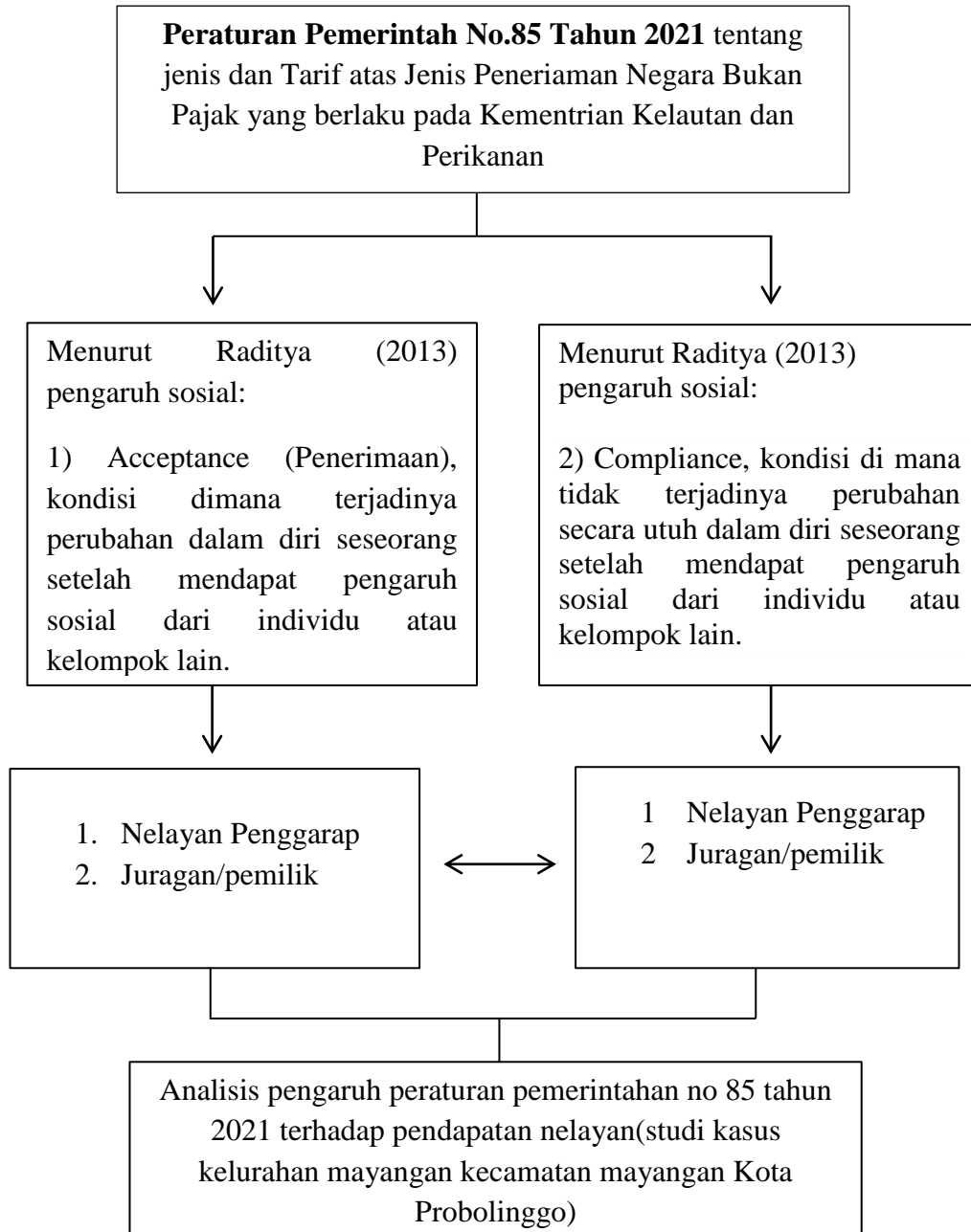
9. Pendapatan Nelayan

Pendapatan nelayan merupakan sumber utama para nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Menurut Baridwan 1992 dalam Syamrilaode (2013) mengutarakan bahwa “pendapatan (revenue) adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”. Pendapatan nelayan bersumber dari pendapatan bersih hasil melaut. Artinya pendapatan yang sudah tidak di potong oleh biaya untuk melaut. Tingkat pendapatan nelayan juga bisa dilakukan dengan melihat proporsi produksi ikan dengan jumlah nelayan per hari. Besarnya pendapatan akan mampu mendorong para nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka maka kebutuhan-kebutuhan lain seperti peningkatan pengelola permukiman serta sarana dan prasarananya akan ikut mengalami peningkatan, hal ini akan mengakibatkan peningkatan kualitas lingkungan permukiman mereka, seperti kondisi rumah layak dan jalan-jalan lokal yang baik (Hudoyo, 2006).

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pemikiran yang dimaksud, yaitu:

Gambar Kerangka Berpikir



Diolah: Nabila nur fitriani(2021)